



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS II JAMBI

LMCK

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024





Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	M. Sidik Pramono	Pengelola Urusan Kerumahtanggaan	21/01/2025	
		Dina Safitri	Jasa Keahlian Teknis dan Administrasi Bidang Transportasi Darat	21/01/2025	
2.	Diperiksa	Alexander T.P Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	21/1/2025	
3.	Disetujui	Alexander T.P Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	21/1/2025	
		Herry Wanda	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan		
		Ikra Surantha, S.T., M.T.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	21/1/2025	
		Riskan, A.Md LLAJ, S.E., M.M.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan		



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS II JAMBI

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.





Adapun isi dari Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini mencakup Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024, serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2024.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat

Dibuat di Jambi
Pada tanggal 21 Januari 2025

Kepala Balai,

Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS II JAMBI

RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari Visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu : Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Rencana Strategis (Renstra) memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
5. Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel.

Dari tujuan diatas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada Tahun 2024 ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sudah baik.

Total 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan sama dengan 100% (IKP=100%) dan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKP} \leq 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100% (target 100%);
2. Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);
3. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 4 lokasi (target 4 lokasi);
4. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 98,61% (target 95%);
5. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 100% (target 100%);
6. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 100% (target 100%);
7. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 30% (target 67%);
8. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 2.269 orang (target 1.500orang);
9. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 54% (target 80%);
10. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP terealisasi 1 Lokasi (target 1 lokasi);
11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai Nilai 90 (target Nilai 90);
12. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai Nilai 90 (target Nilai 90).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
1.2.1. Bagan Struktur Organisasi.....	5
I.3. Sumber Daya Manusia.....	6
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	7
I.5. Sistematika Laporan.....	8
I.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	12
I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja	26
II.2 Pengukuran Capaian Kinerja	26
2.2.1 SK 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	31
2.2.2 SK 2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	43
2.2.3 SK 4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	51
2.2.4 SK 5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	69
2.2.5 SK 1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel	73
II.3. Realisasi Anggaran	78

BAB III PENUTUP

III.1 Ringkasan Capaian	94
III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	96

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2024;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024;
8. Monitoring Rencana Aksi Bulan Desember Tahun 2024.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Sumber Daya Manusia BPTD Kelas II Jambi	6
Tabel I.2.	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024	13
Tabel I.3.	Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024	15
Tabel I.4.	Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024.....	17
Tabel I.5.	Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024.....	20
Tabel I.6.	Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024.....	20
Tabel II.1.	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Triwulan IV Tahun 2024	29
Tabel II.2.	Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel II.3.	Target dan realisasi IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Terhadap Revisi II PK Tahun 2024	37
Tabel II.4.	Target dan realisasi IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 Terhadap Revisi II PK Tahun 2024.....	41
Tabel II.5.	Target dan realisasi IKK Persentase Pelaksanaan (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 Terhadap Revisi II PK Tahun 2024	45
Tabel II.6.	Target dan realisasi IKK Persentase Pelaksanaan (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 Terhadap Revisi II PK Tahun 2024	48
Tabel II.7.	Target dan realisasi IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2024 Terhadap Revisi II PK Tahun 2024...	52
Tabel II.8.	Target dan realisasi IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Hubdat Tahun 2024 Terhadap Revisi II PK Tahun 2024.....	56
Tabel II.9.	Target dan realisasi IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	60
Tabel II.10.	Target dan realisasi IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	64
Tabel II.11.	Target dan realisasi IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	67
Tabel II.12.	Target dan realisasi IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	70

Tabel II.13.	Tabel perhitungan Capaian Indikator Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat..	72
Tabel II.14.	Target dan realisasi IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	74
Tabel II.15.	Tabel perhitungan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	72
Tabel II.16	Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024	78
Tabel II.17	Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV Tahun 2024	78
Tabel II.18	Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024.....	79
Tabel II.19	Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV Tahun 2024	79
Tabel II.20	Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2024	82
Tabel II.21	Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2024	83
Tabel II.22	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024...	84
Tabel II.23	Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2024....	85
Tabel II.24	Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024.....	86
Tabel II.25	Rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	87
Tabel II.26	Rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024	89
Tabel II.27	Rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024	89
Tabel II.28	Anggaran Kegiatan yang terkena <i>Automatic Adjustment</i>	90
Tabel II.29	Sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024	90
Tabel II.30	Sisa Anggaran per Sumber Dana Tahun Anggaran 2024	91
Tabel II.31	Tabel efisiensi penggunaan sumber daya keuangan	92
Tabel II.32	Rincian penggunaan sumber daya manusia Tahun 2024	93
Tabel III.1	Tabel Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
Gambar II.2	Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	37
Gambar II.3	Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	41
Gambar II.4	Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	44
Gambar II.5	Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	48
Gambar II.6	Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	52
Gambar II.7	Grafik Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	56
Gambar II.8	Grafik Capaian Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	60
Gambar II.9	Grafik Capaian Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	63
Gambar II.10	Grafik Capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	67
Gambar II.11	Grafik Capaian Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	70
Gambar II.12	Grafik Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024	74

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2024;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024;
8. Monitoring Rencana Aksi Bulan Desember Tahun 2024.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS II JAMBI

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraannya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah yang dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing masing instansi pemerintah tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib membuat Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2024.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas :

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan, Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Sarana, Prasarana, Lalu lintas dan angkutan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian

Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.1. Bagan Struktur Organisasi



I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di BPTD Kelas II Jambi adalah sebanyak 319 orang dengan rincian 169 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 148 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II

NO	UNIT KERJA	JUMLAH		TOTAL
		PNS/PPPK	PPNPN	
1	KANTOR INDUK BPTD KELAS II JAMBI	47	22	69
2	TERMINAL TIPE A ALAM BARAJO KOTA JAMBI	31	23	54
3	TERMINAL TIPE A SRI BULAN KAB. SAROLANGUN	12	12	24
4	TERMINAL TIPE A PULAU TUJUH BANGKO KAB. MERANGIN	13	18	31
5	TERMINAL TIPE A MUARA BUNGO KAB. MUARA BUNGO	18	19	37
6	UPPKB JAMBI MERLUNG	11	25	36
7	UPPKB MUARA TEMBESI	16	16	32
8	UPPKB SAROLANGUN	9	8	17
9	UPPKB SUNGAI PENUH		1	1
10	PELABUHAN PENYEBERANGAN KUALA TUNGKAL	4	3	7
11	PELABUHAN SUNGAI PS. ANGSO DUO	5		
12	PELABUHAN SUNGAI NIPAH PANJANG	2		
13	PELABUHAN SUNGAI MENDAHARA	3	1	4
JUMLAH		171	148	319

I.4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1. Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat petunjuk teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah pusat yaitu penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung pembangunan prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah:

- a. Pengoperasian Terminal Penumpang;
- b. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
- c. Penataan dan Pembinaan SDM Transportasi Darat;
- d. Perubahan *mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
- e. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
- f. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024 adalah:

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Indikator Kinerja Kegiatan;
- d. Pengukuran Kinerja;
- e. Evaluasi Kinerja.

I.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) Triwulan III ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan
- I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024
- I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

- II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- II.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - II.2.1. SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
 - II.2.1.1 IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - II.2.1.2 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
 - a.1) Definisi Indikator Kinerja
 - a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.3 IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2. SK. 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.2.2.1 IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.2 IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3. SK. 4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat

II.2.3.1 IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.2 IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.3 IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.4 IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3.5 IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK. 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

II.2.4.1 IKK 5.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK. 1 Meningkatkan birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1) Definisi Indikator Kinerja
- a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

- 1. Pagu Anggaran
 - a. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024
 - b. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - c. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran
- 2. Refocusing Anggaran Tahun 2024
 - a. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024
 - b. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - c. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024
 - d. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2024

II.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

- 1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024
- 2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024
- 3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2024
- 4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- 1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
- 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
- 3. Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024;
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2024;
3. Rencana Aksi Tahun 2024;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2024;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2024;
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;
9. Revisi Monitoring Rencana Aksi Tahun 2024;
10. Lain-lain yang dianggap perlu.

1.6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Jambi dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	4	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	7	7	4	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	75	80	90	95	100
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	100	100	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	45	50	60	80	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	3	2	1,5	1	0
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	30	50	40	-	50
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	750	1000	1500	2000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	60	70	75	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	50	100	150	200	250

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	82	84	87	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	82	85	88	90

I.6.1 Uraian / Narasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024 terdiri atas Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	67
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500

		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

I.7. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2023 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Jambi Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

I.7.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2024

Pada bulan Juli Tahun 2024 dilakukan Revisi I Perjanjian Kinerja kepala BPTD Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, pergantian Kepala Balai, perubahan target pada salah satu Indikator Kinerja Kegiatan dan revisi anggaran. Perubahan target pada indikator kinerja kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yang semula memiliki target sebesar 1% menjadi 67%.

Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp. 89.125.808.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.5 Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Jambi Tahun 2024



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.
 Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
 Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K
 Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

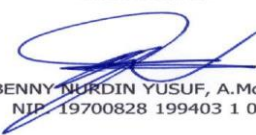
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433

Jambi, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	67
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.788.818.000

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433

Jambi, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

I.7.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2024

Pada bulan Desember Tahun 2024 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja II Kepala BPTD Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan adanya perubahan anggaran pada DIPA Satuan Kerja BPTD Kelas II Jambi. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran BPTD Kelas II Jambi total anggarannya menjadi Rp. 109.361.095.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.6 Revisi II Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

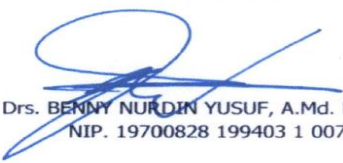
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat


AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 2 Desember 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi


Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	67
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

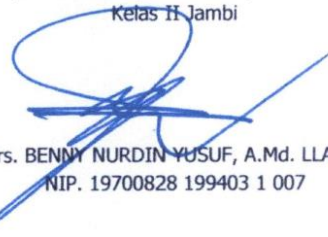
KEGIATAN	ANGGARAN
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 16.837.318.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 51.625.548.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 20.686.787.000

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 2 Desember 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS II JAMBI

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

II.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

II.2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *E-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2024 Dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Kelas II Jambi, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja BPTD Kelas II Jambi Triwulan IV Tahun 2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Q1			Q2			Q3			Q4		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
SK 1. Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					75%			83%			90%			100%
IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	0	23,85	23,85%	100	50	50%	100	71	71%	100	100	100%
IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
SK 2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat					49%			49%			49%			102%
IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	95	68,51	72%	95	68,51	72%	95	68,51	72%	95	98,61	103,8%
IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	25	25%	100	25	25%	100	25	25%	100	100	100%
SK 4. Meningkatkan keselamatan transportasi darat					46%			48%			106%			115%
IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	4	4%	100	12	12%	100	51	51%	100	100	100%
IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	67	67	28	158%	67	28	158%	67	28	158%	67	30	155,22%
IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1500	0	0%	1500	0	0%	1.500	2.269	151%	1.500	2.269	151,27%
IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	54	68%	80	54	68%	80	54	68%	80	54	67,5%
IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	0	0%	1	0	0%	1	1	100%	1	1	100%
SK 5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat					24%			58%			76,67%			100%

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	22	24%	90	52	58%	90	69	76,67%	90	90	100%
SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						33%			92%			93,67%			100%
IKK1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	30	33%	90	83	92%	90	84,3	93,67%	90	90	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						44%			67%			79,4%			103%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						47%			62%			82%			106%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKK $\geq$ 100%)						3			3			5			11
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0% $\leq$ IKK<100%)						9			9			7			1

Selama tahun 2024, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 12 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan dan dilaksanakan memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan angkutan perintis di jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan.

Penyelenggaraan angkutan jalan perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Capaian kinerja persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan jumlah trayek angkutan perintis yang dilayani.

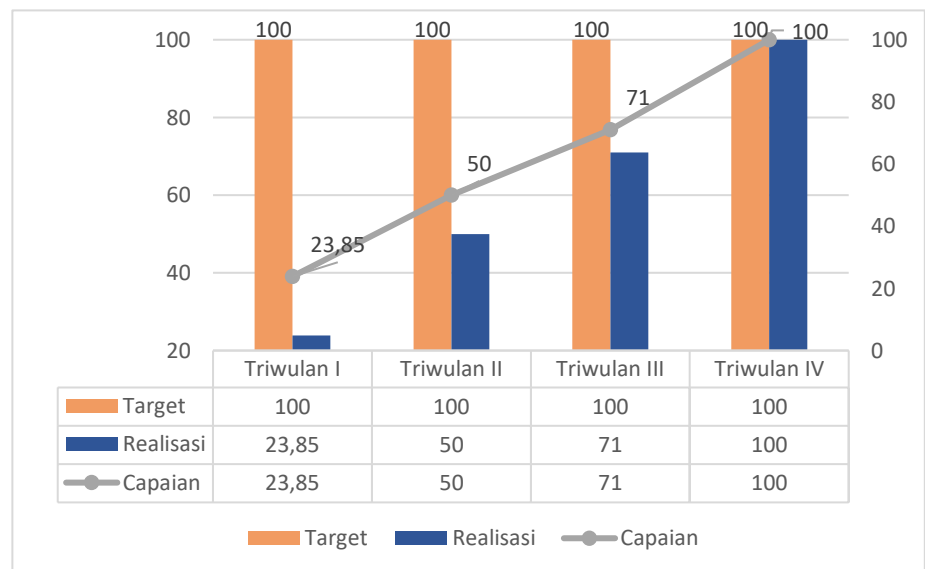
Keterangan:

Trayek yang dilayani adalah:

1. Desa Sungai Jernih – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
2. Desa Tanah Tumbuh – Sp. Niam – Terminal Muara Bulian;
3. Desa Bangun Seranten – Terminal Bungo;
4. Desa Belukar Panjang – Terminal Tipe A Muara Bungo;
5. Desa Sari Mulya – Terminal Tipe A Muara Bungo;
6. Desa Suo-Suo – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
7. Desa Pemayung – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
8. Desa Mekar Jaya – Terminal Muara Bulian – Terminal Alam Barajo Jambi.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dibawah ini :



Gambar II.1 Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini tabel rincian realisasi setiap Triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024.

Tabel II.2 Tabel Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	100	100	100	100
2.	Realisasi	23,85	50	71	100
3.	Capaian	23,85%	50%	71%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8317 Tahun 2023 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2024;
5. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

c. Faktor-faktor keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Adanya dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan angkutan perintis;
3. Kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah terkait usulan trayek, pengawasan dan pelaporan;
4. Perencanaan yang matang dalam menentukan trayek yang akan dilayani oleh angkutan perintis tersebut;
5. Minat masyarakat yang tinggi terhadap angkutan perintis tersebut.

d. Faktor-faktor kegagalan atau potensi kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Load factor yang rendah;
3. Sebagian besar akses jalan menuju daerah yang dijangkau oleh angkutan perintis ini masih rusak dan sulit ditempuh;
4. Faktor cuaca maupun kondisi geografis dari daerah yang dijangkau angkutan perintis.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$IKK1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

Keterangan:

RIT adalah satu kali perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan atau sebaliknya.

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2.688}{2.688} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 mencapai 100%.

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 4.803.741.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 4.799.838.000,- atau mencapai 99,92% dengan nomenklatur pada POK yaitu Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional), Kode Anggaran: 4637.QAH.001.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Jambi dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum;
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat;
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal;
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum;
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

2.2.1.2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

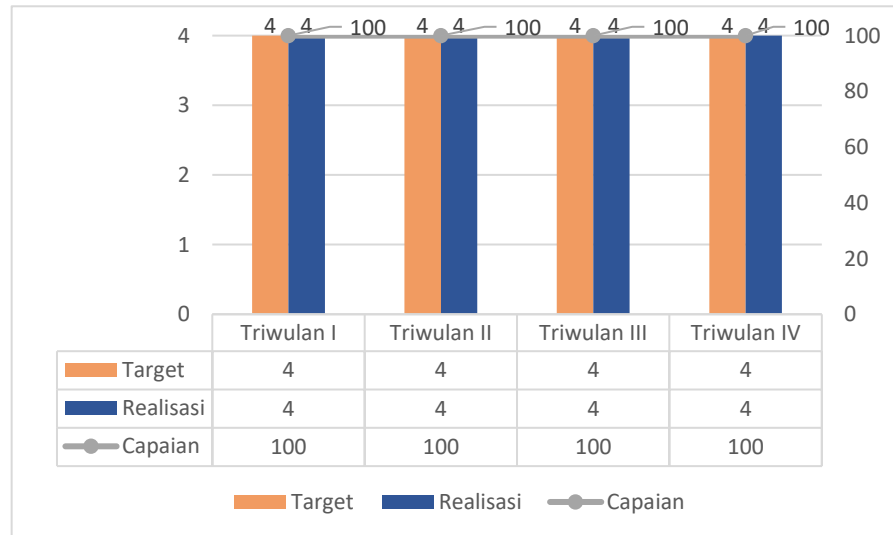
Terminal Tipe A yang Beroperasi merupakan Terminal Tipe A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Terminal Tipe A adalah Terminal Tipe A yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sedangkan Terminal Barang yang Beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani angkutan barang di jalan. Terminal Tipe A yang beroperasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ada 4 Terminal yaitu:

1. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
2. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
3. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
4. Terminal Tipe A Muara Bungo.

Sedangkan Terminal Barang tidak dikelola oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Selanjutnya maksud dari IKK tersebut adalah untuk mengetahui berapa jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah naungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2024 sebanyak 4 lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.2 Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini rincian realisasi setiap Triwulan untuk Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2024.

Tabel II.3 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	4	4	4	4
2.	Realisasi	4	4	4	4
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

3. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi memiliki target 4 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Terminal Tipe A yang beroperasi pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi ada 4 Terminal yaitu:

1. Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
2. Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
3. Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
4. Terminal Tipe A Muara Bungo.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat;
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor;

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum yang telah disediakan;
2. Fasilitas umum di Terminal masih kurang memadai bagi pengguna layanan;
3. Kurang terpenuhi kebutuhan operasional Terminal dikarenakan minimnya anggaran operasional pada Terminal.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

IKK 1.3 = Jumlah terminal tipe A dan terminal barang yang beroperasi

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 8.233.829.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 7.719.657.751,- atau mencapai 93,76% dengan nomenklatur pada POK yaitu Terminal Penumpang Tipe-A dikelola, Kode Anggaran: 4638.CDP.040.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan sosialisasi kepada Organda serta masyarakat pengguna angkutan umum untuk turut serta meramaikan terminal yang sudah ada;
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas terminal Tipe-A;
5. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang;
6. Meningkatkan minat Masyarakat agar lebih banyak menggunakan Transportasi Umum;
7. Meningkatkan pendapatan PNBK di Terminal Tipe-A.

2.2.1.3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi**a.1) Definisi Indikator Kinerja**

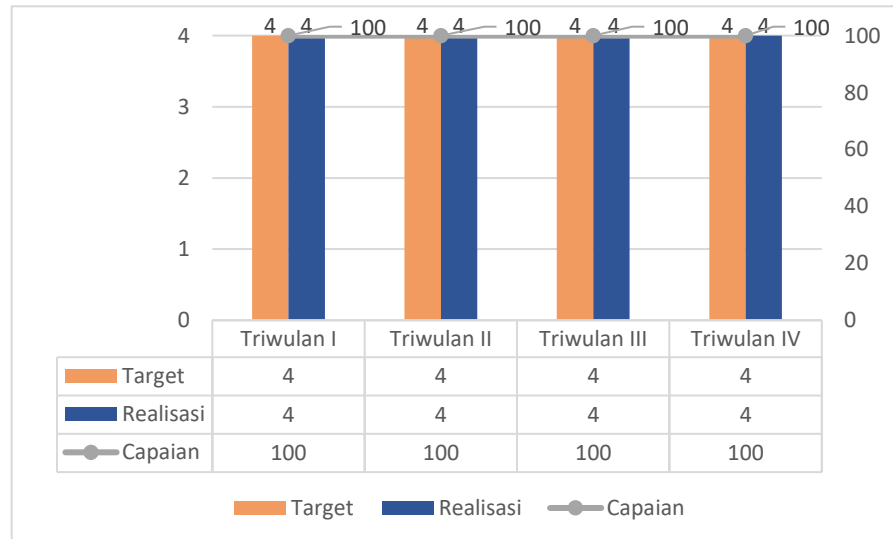
Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. Sedangkan Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan Sungai, Danau, Waduk, dan Terusan. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang Beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN. BPTD Kelas II Jambi memiliki Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab terhadap keselamatan transportasi angkutan umum berjalan dengan baik.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target 4 Lokasi. Berdasarkan PM 12 Tahun 2024 Jumlah Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada BPTD Kelas II Jambi, yaitu :

1. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal;
2. Pelabuhan Sungai Angso duo;
3. Pelabuhan Sungai Nipah Panjang;
4. Pelabuhan Sungai Mendahara.

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 sebesar 4 Lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 4 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik capaian sebagai berikut:



Gambar II.3 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan untuk Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi yang beroperasi Tahun 2024.

Tabel II.4 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	4	4	4	4
2.	Realisasi	4	4	4	4
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi memiliki target 4 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Berdasarkan PM 12 Tahun 2024 Jumlah Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan pada BPTD Kelas II Jambi, yaitu :

1. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal;
2. Pelabuhan Sungai Angso duo;
3. Pelabuhan Sungai Nipah Panjang;
4. Pelabuhan Sungai Mendahara.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran operasional pelabuhan;
2. Peningkatan pengawasan operasional Pelabuhan;
3. Petugas yang kompeten dibidangnya;
4. Koordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
5. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. SDM yang kurang memadai;
2. Minimnya pelaksanaan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelabuhan;
3. Tidak optimalnya pengawasan operasional Pelabuhan;
4. Pemeliharaan dan perawatan fasilitas di Pelabuhan yang tidak maksimal sehingga banyak fasilitas di Pelabuhan yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar:

$$IKK\ 1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun (n)}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.215.322.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 952.468.435,- atau mencapai 78,37% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dikelola, Kode Anggaran: 4638.CDP.045.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik;
3. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun;
4. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
5. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan;
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP.

2.2.2. Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi**Darat**

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A;
2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

2.2.2.1. IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

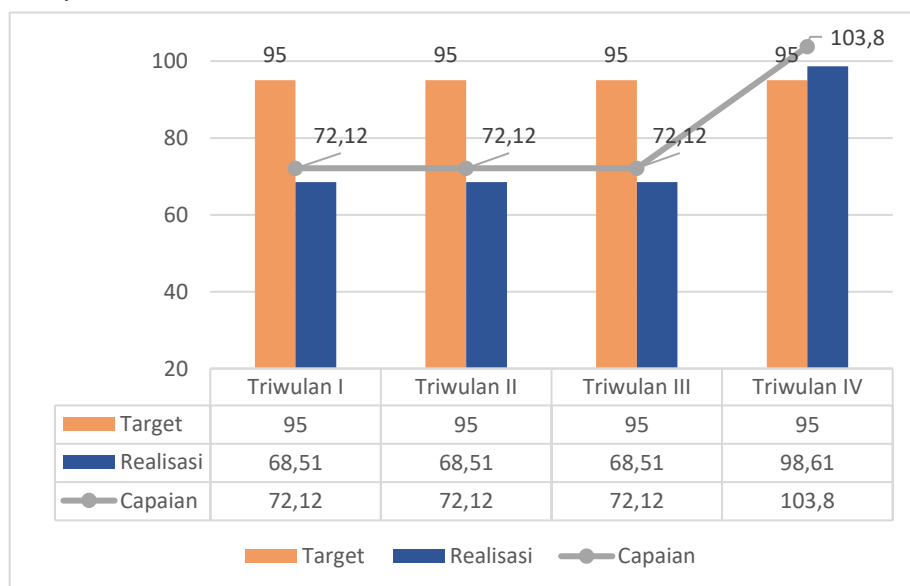
a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup (1) pelayanan keselamatan, (2) pelayanan keamanan, (3) pelayanan kehandalan/keteraturan, (4) pelayanan kenyamanan, (5) pelayanan kemudahan/keterjangkauan, dan (6) pelayanan kesetaraan.

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 sebesar 98,61%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 95% maka capaian kinerja mencapai 103,8%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.4 Grafik Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2024.

Tabel II.5 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	95	95	95	95
2.	Realisasi	68,51	68,51	68,51	98,61
3.	Capaian	72,12%	72%	72%	103,8%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4951/AJ.002/DRJD/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Kebersihan, Ketertiban, dan Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A memiliki target sebesar 95% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya, sedangkan untuk target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi pada Tahun 2024 sebesar 100%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan:

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah Pusat dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe A;
2. Pelaksanaan operasional terminal tipe A sesuai standar operasional prosedur pengoperasian terminal penumpang tipe A yang telah ditetapkan;
3. Fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Terpenuhinya Keamanan, Kebersihan, Ketertiban yang ada di Terminal.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebagai berikut :

1. Ketidakpuasan masyarakat saat menggunakan layanan transportasi yang digunakan;
2. Pelaksanaan operasional Terminal Tipe A yang belum sesuai Standar Operasional Prosedur pengoperasional Terminal penumpang Tipe A;
3. Kurangnya monitoring terhadap fasilitas di Terminal dan operasional kendaraan yang beroperasi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Tahun 2024 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu:

$$IKK2.1 = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{98,61}{95} \times 100\% = 103,8\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.203.000.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.199.018.800,- atau mencapai 99,67% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kode Akun: 523111.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A.

2.2.2.2. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

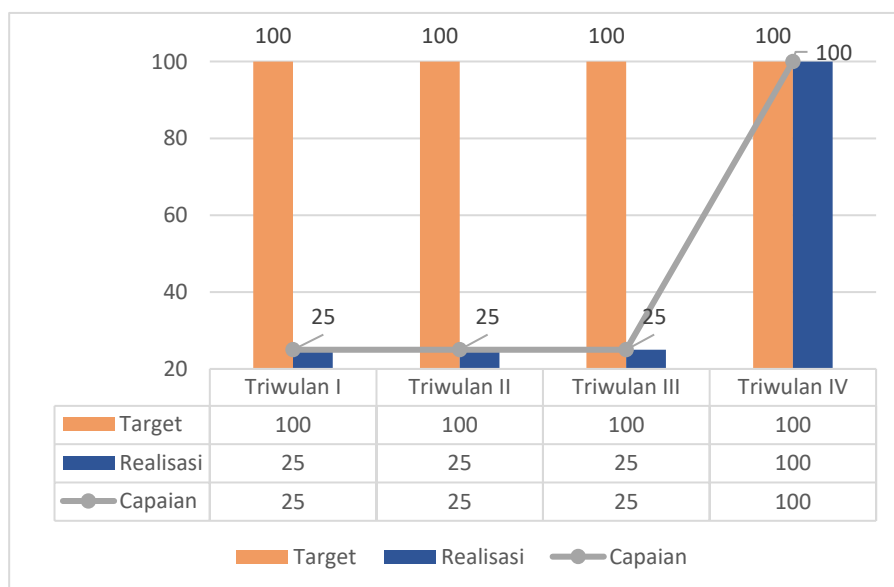
Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP saat ini diukur hanya pada 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan atau 14 Pelabuhan Penyeberangan yang melayani, diantaranya: Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padangbai, Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-API, Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian, Pelabuhan Penyeberangan Kayangan, Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Pelabuhan Penyeberangan Bajoe, Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Pelabuhan Penyeberangan Penajam. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelabuhan Penyeberangan diatur melalui PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelabuhan Penyeberangan.

Selanjutnya, diperluas tidak hanya 7 (tujuh) lintas utama penyeberangan, melainkan pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat dengan cara melibatkan BPTD dalam

pemantauan SPM. Adapun BPTD Kelas II Jambi sebagai pengawas pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP yang berada di wilayah kerja BPTD Kelas II Jambi untuk memeriksa dan mengevaluasi pemenuhan SPM.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.5 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2024.

Tabel II.6 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	100	100	100	100
2.	Realisasi	25	25	25	100
3.	Capaian	25%	25%	25%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
4. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
5. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP memiliki target sebesar 100% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi pada Tahun 2024 sebesar 100%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah pusat dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan Pelabuhan SDP;
2. Pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP sesuai Standar Operasional Prosedur pengoperasian Pelabuhan SDP yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan pengawasan secara periodik.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

1. SDM yang kurang memadai dan kurang berkompeten;
2. Pelaksanaan operasional Pelabuhan SDP yang belum sesuai Standar Operasional Prosedur pengoperasian Pelabuhan SDP yang telah ditetapkan;
3. Masih ditemukannya kendaraan ODOL yang menggunakan fasilitas angkutan penyeberang sehingga dapat membahayakan kendaraan dan pengguna jasa lain.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelabuhan dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

$$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP hanya dilaksanakan pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal dikarenakan untuk Pelabuhan Sungai belum ada dasar perhitungan yang mengatur. Perhitungan pada Pelabuhan Penyeberangan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 753.711.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 686.801.256,- atau mencapai 91,12% dengan nomenklatur pada POK yaitu Operasional Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Anggaran: 4638.CDP.045 Kode Sub Komponen: A.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.

2.2.3. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
4. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

2.2.3.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

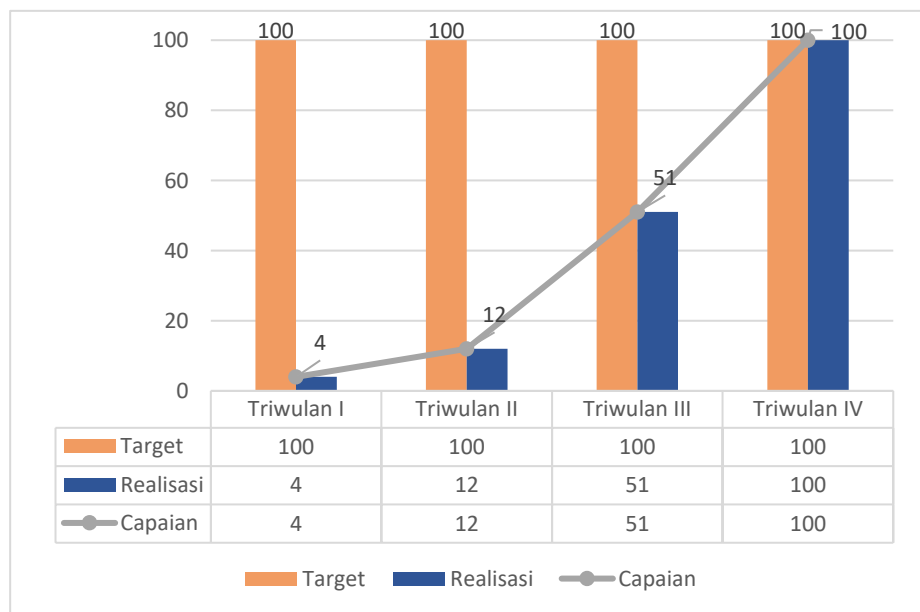
1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;

7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Jaringan Jalan Nasional berdasarkan KP. 209/KPTS/M/2015.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.6 Grafik Capaian IKK Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Tahun 2024.

Tabel II.7 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	100	100	100	100
2.	Realisasi	4	12	51	100
3.	Capaian	4%	12%	51%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah terpasang kondisi ideal memiliki target sebesar 100% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi pada Tahun 2024 sebesar 100%.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

1. Perencanaan yang matang dalam pemasangan perlengkapan jalan;
2. Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
3. Monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi yang masih kurang terhadap kondisi perlengkapan jalan yang telah terpasang dan perlengkapan jalan yang dibutuhkan.
2. Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
3. Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

$$IKK3.1 = \frac{\text{jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{247.586}{247.586} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 36.839.924.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 36.752.915.750,- atau mencapai 99,76% dengan nomenklatur pada POK yaitu Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional), Kode Anggaran: 4639.RAC.053.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rusak;
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga faslitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
3. Berusaha melaksanakan pembangunan yang tepat waktu.

2.2.3.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

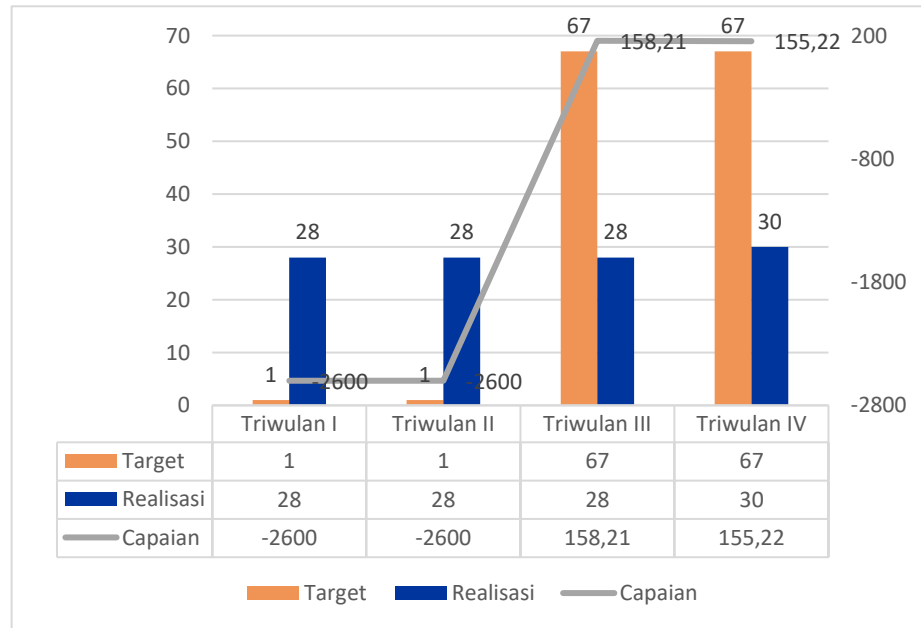
Persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

Pada IKK tersebut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor disebut UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran Over Dimensi dan Over Load. BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Fasilitas Penimbangan yang dilaksanakan oleh Satpel UPPKB untuk pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

1. Tata cara pemuatan barang;
2. Dimensi kendaraan Angkutan Barang;
3. Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
4. Dokumen Angkutan Barang;
5. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
6. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan dan asal tujuan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 sebesar 30%, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 67%, maka capaian kinerja mencapai 155,22%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.7 Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024.

Tabel II.8 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	1	1	67	67
2.	Realisasi	28	28	28	30
3.	Capaian	-2.600	-2.600	158,21%	155,22%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I dan Triwulan II Target pada IKK tersebut sebesar 1%, sementara rata-rata realisasi pelanggaran masih cukup besar sebesar 28% sehingga angka capaian untuk IKK tersebut mencapai angka minus atau kurang baik.

2. Pada bulan Juli diadakan rapat terkait penetapan Target pada IKK tersebut dan pada hasil rapat Target yang semula sebesar 1% diubah menjadi 67% dikarenakan sulitnya untuk mencapai target semula sebesar 1%.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 85 Tahun-2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
4. Pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan bisa dipedomani melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.736/AJ/108/DRJD/2017 Tanggal 21 Februari 2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
5. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024 target awal Perjanjian Kinerja IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat sebesar 1%, pada Revisi I Perjanjian Kinerja pada bulan Juli terjadi Perubahan target pada IKK tersebut menjadi sebesar 67% dikarenakan sulitnya untuk mencapai target semula sebesar 1%, dari data capaian IKK tersebut persentase jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB masih didapatkan jumlah pelanggaran yang cukup besar.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

1. Kesadaran dari pihak perusahaan angkutan barang akan bahayanya *Over Dimension Over Load* (ODOL)
2. Para sopir dan armada angkutan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
3. Ketegasan petugas dalam melakukan pemeriksaan kendaraan.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut:

1. Tidak patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
2. Masih banyaknya kendaraan yang tidak memasuki UPPKB untuk melakukan pengecekan kelaikan kendaraan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

$$IKK\ 3.2 = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk pada UPPKB}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan realisasi Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{9.649}{31.904} \times 100\% = 30\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{target} - (\text{rata-rata-target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(67\% - (30\% - 67\%))}{67\%} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 155,22\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 6.363.734.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 5.671.381.256,- atau mencapai 89,12% dengan nomenklatur pada POK yaitu Unit Pelaksana

Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola, Kode Anggaran: 4639.CDP.077.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait *Over Dimensi Over Load* (ODOL) kendaraan barang;
2. Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan *Over Dimensi Over Load* (ODOL);
3. Menyelenggarakan Gakkum bersama Dinas Perhubungan setempat, anggota Polisi, serta Jasa Raharja.

2.2.3.3. IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan

Pada Perjanjian Kinerja awal Tahun Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan memiliki target sebanyak 10 Lokasi, pada Revisi II Perjanjian Kinerja target Indikator Kinerja Kegiatan tersebut dihapuskan dikarenakan Pagu Anggaran pada kegiatan tersebut terkena *Automatic Adjustment*, sehingga pelaksanaan kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana.

2.2.3.4 IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

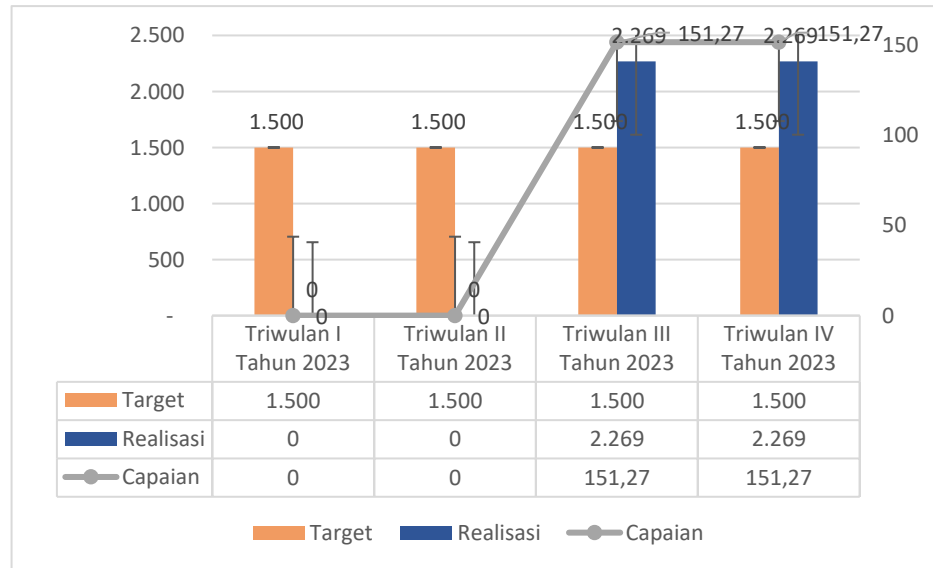
Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

Jumlah Masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan di setiap Balai Pengelola Transportasi Darat.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan pada Tahun 2024 sebanyak 2.269 Orang jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebanyak 1.500 Orang, maka capaian kinerja mencapai 151,27%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar II.8 Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Tahun 2024 Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini rincian capaian setiap Triwulan untuk Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Tahun 2024.

Tabel II.9 Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	1.500	1.500	1.500	1.500
2.	Realisasi	0	0	2.269	2.269
3.	Capaian	0%	0%	151,27%	151,27%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang

dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang Keselamatan Jalan memiliki target sebanyak 1.500 Orang yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
2. Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

1. Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
2. Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;

3. Tidak tersampainya informasi keselamatan bagi masyarakat yang tidak memperhatikan sosialisasi;

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan realisasi kinerja Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

$$IKK3.5 = \text{Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ}$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{2.269}{1.500} \times 100\% = 151,27\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 350.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 349.953.007,- atau mencapai 99,99% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional), Kode Anggaran: 4639.PEH.049.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan:

1. Melakukan edukasi kesadaran tertib berlalu lintas;
2. Memberikan hiburan menarik dalam acara sosialisasi keselamatan transportasi jalan;
3. Melakukan koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas.

2.2.3.6 IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1) Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

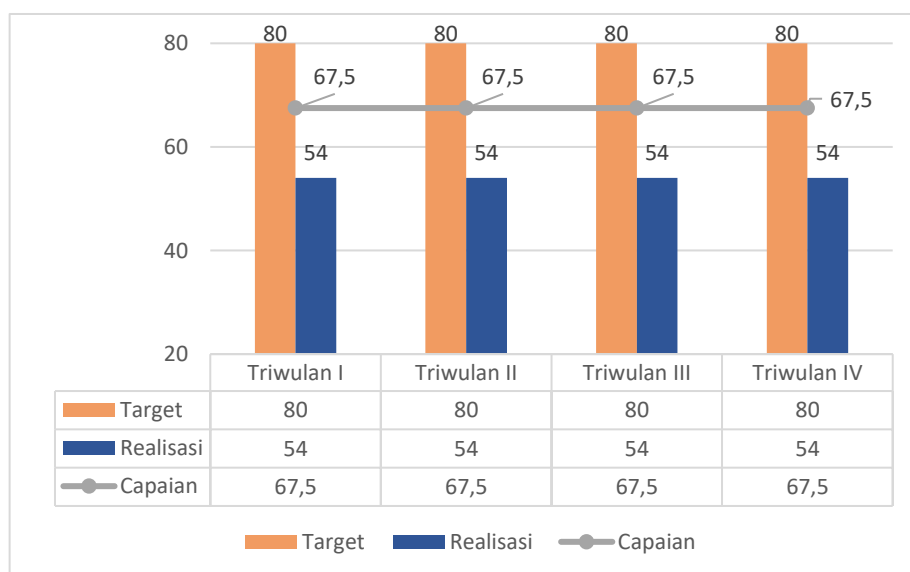
Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah unit Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah seluruh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 sebesar 54% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 67,5%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.9 Grafik Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan untuk Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024.

Tabel II.10 Tabel Capaian IKK Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	80	80	80	80
2.	Realisasi	54	54	54	54
3.	Capaian	67,5%	67,5%	67,5%	67,5%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1471/aj.402/drjd/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor memiliki target sebesar 80% yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota;
2. Pelaksanaan standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai Standar Operasional Prosedur standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah ditetapkan.
3. Tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kompetensi.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Tidak memiliki gedung uji;
2. Kurangnya perawatan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang belum memenuhi syarat akreditasi.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dengan menggunakan rumus perhitungan manual IKK sebagai berikut:

$$IKK\ 7a = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{6}{11} \times 100\% = 54\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{54}{80} \times 100\% = 67,5\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 185.074.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 184.712.000,- atau mencapai 99,80% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Kode Anggaran: 4640.FAE.923 Detil Kegiatan: B Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Mengadakan bimbingan teknis dan peningkatan kompetensi SDM terhadap petugas penguji berkala kendaraan bermotor;
2. Monitoring dan evaluasi yang rutin terhadap pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
3. Rutin melaksanakan kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor.

2.2.3.7 IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

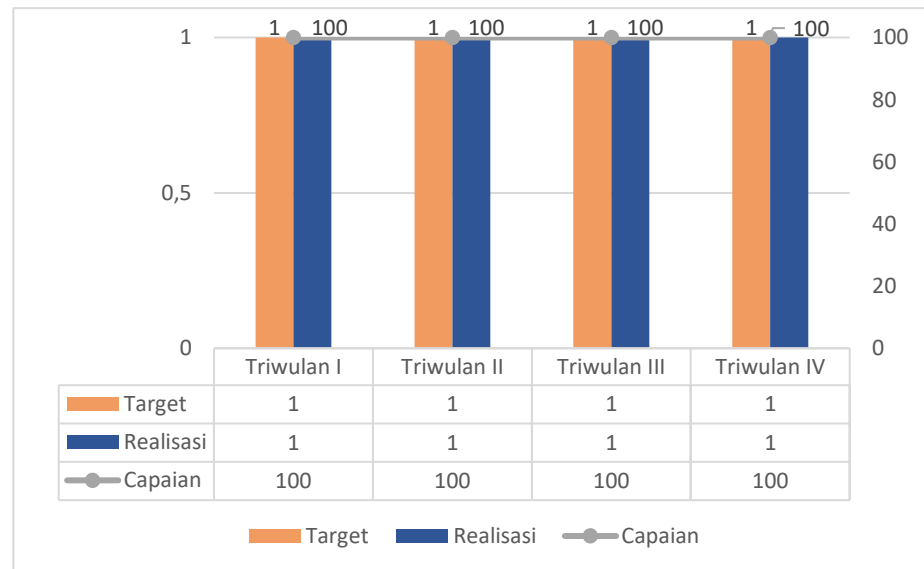
a.1) Definisi Indikator Kinerja

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024 sebanyak 1 Lokasi, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebanyak 1 Lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.10 Grafik Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024.

Tabel II.11 Tabel Capaian IKK Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	1	1	1	1
2.	Realisasi	1	1	1	1
3.	Capaian	100%	100%	100%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

3. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP memiliki target sebanyak 1 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Kondisi dilapangan yang mendukung, seperti cuaca;
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu;
3. Kesesuaian dengan kebutuhan.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Kondisi cuaca buruk;
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2024

IKK 7b = Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun (n)

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.794.780.641,- atau mencapai 99,71% dengan

nomenklatur pada POK yaitu Rambu Sungai dan Danau, Kode Anggaran: 4639.CAC.065.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan;
4. Menginventarisasi kembali jumlah rambu sungai yang akan dipasang;
5. Memasang rambu sungai di daerah yang belum terpasang.

2.2.4. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

2.2.4.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a. Aspek Perencanaan;
- b. Aspek Kepegawaian (SDM);
- c. Aspek Keuangan;
- d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (Umum).

Aspek perencanaan dimulai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Penginputan Aplikasi e-Performance.

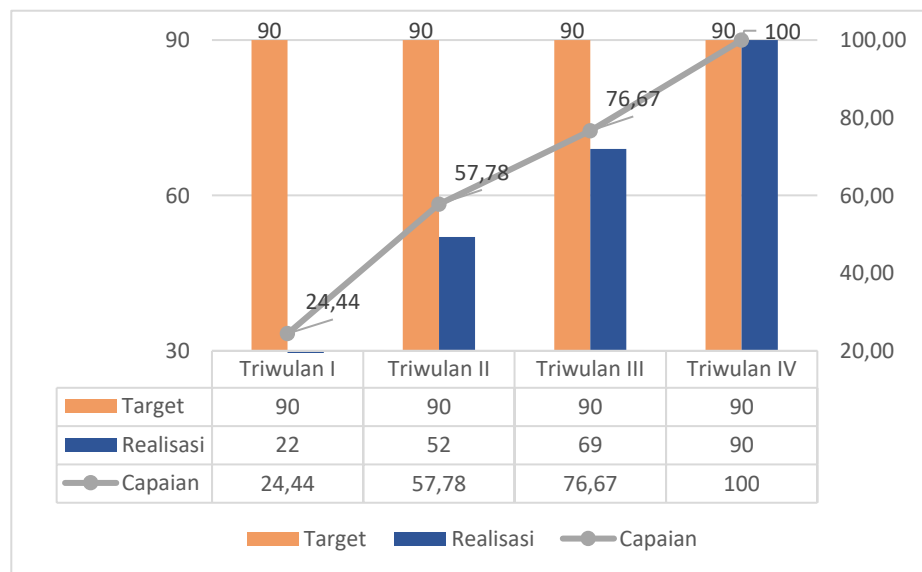
Aspek Kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja dan disiplin.

Aspek Keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran dinilai

berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 yaitu Nilai 90, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu Nilai 90, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.11 Grafik Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024.

Tabel II.12 Tabel Capaian IKK Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	90	90	90	90
2.	Realisasi	22	52	69	90
3.	Capaian	24,44%	57,78%	76,67%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terhadap

target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Revisi Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat memiliki target Nilai 90 yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya. Penyelenggaraan kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Penunjang Teknis Transportasi Darat.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Kegiatan terlaksana dengan waktu yang telah direncanakan;
3. Koordinasi dengan stakeholder terkait untuk masing-masing kegiatan.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan Realisasi Kinerja Indikator Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.13 Tabel perhitungan Capaian Indikator Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	25%	25%
	1 <i>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</i>	10%	10%
	2 <i>Perjanjian Kinerja</i>	5%	5%
	3 <i>pengisian input e-planning</i>	5%	5%
	4 <i>pengisian input e-performance</i>	5%	5%
B	Indeks Profesionalisme ASN	25%	21 %
	1 <i>Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)</i>	6%	6%
	2 <i>Kompetensi</i>	10%	6%
	3 <i>Kinerja</i>	8%	8%
	4 <i>Disiplin</i>	1%	1%
C	Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja	25%	24%
D	Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran	25%	20%

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90}{90} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 4.143.720.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 3.571.415.231,- atau mencapai 86,19% dengan nomenklatur pada POK yaitu Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan, Kode Anggaran: 4640.FAE.923.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Jambi secara optimal;
2. Rutin melaksanakan evaluasi secara internal terkait kinerja yang sedang berlangsung guna meminimalisir tidak tercapainya target kinerja tahun berjalan;
3. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil pengawasan dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPTD Kelas II Jambi.

2.2.5. Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel

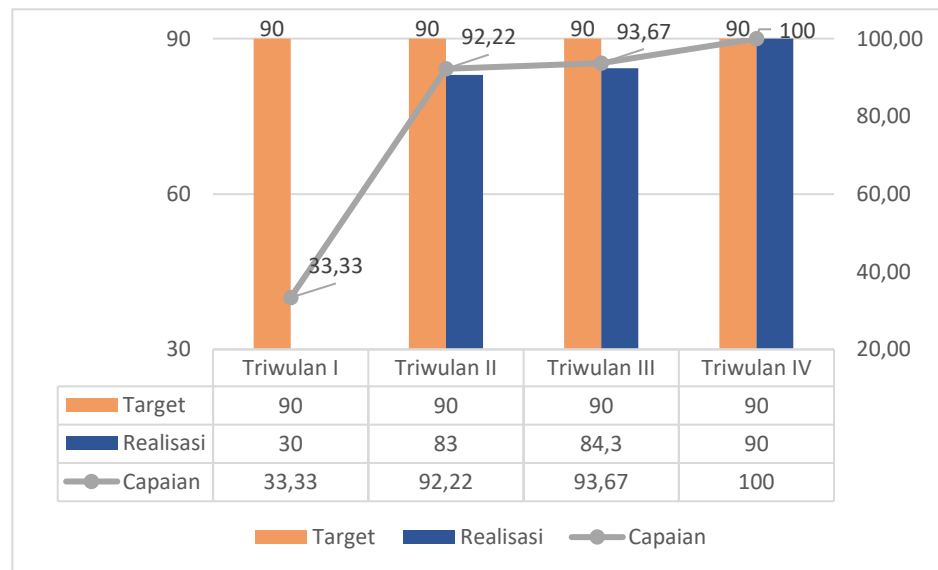
2.2.5.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1) Definisi Indikator Kinerja

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

a.2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 yaitu Nilai 90, jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu Nilai 90, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar II.12 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berikut ini tabel rincian capaian setiap Triwulan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024.

Tabel II.14 Tabel Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2024 terhadap Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Rincian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Target	90	90	90	90
2.	Realisasi	30	83	84,3	90
3.	Capaian	33,33%	92,22%	93,67%	100%

Tabel di atas merupakan perbandingan target dan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap target pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang dihitung berdasarkan rumus perhitungan manual indikator kinerja kegiatan.

a.3) Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

- Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- Birokrasi yang kapabel;

- c) Pelayanan publik yang prima.
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- 3. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2024, Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat memiliki target Nilai 90 yang diperoleh dari capaian terhadap Perjanjian Kinerja di Tahun sebelumnya. Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat yang telah dilaksanakan yaitu Kegiatan Program Dukungan Manajemen.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

- 1. SDM yang cukup dan berkualitas;
- 2. Penyerapan anggaran yang maksimal dan tepat guna;
- 3. Pelaksanaan evaluasi setiap bulan.

d. Faktor-faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan:

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi anggaran yang kurang tepat;
- 2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- 3. Kurangnya SDM.

e. Perhitungan Realisasi Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

- 1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja);
- 2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran;
- 3. Bobot:

- a) Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
- b) Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
- c) Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel II.15 Tabel Perhitungan Realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

NO	URAIAN		BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV		25%	25%
	1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	15%	15%
	2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	10%	10%
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	25%
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	40%
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	20%
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	10%
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	10%
Total Nilai			100	90

Cara Perhitungan:

1. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;
2. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner;
3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

- a) Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

- b) Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

- c) Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Note:

- *) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan
Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security
- **) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (*download*) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
- ***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

f. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90}{90} \times 100\% = 100\%$$

g. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Pagu Anggaran Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 27.171.610.000,-. Adapun realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 22.172.240.577.

a.4) Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran BPTD Kelas II Jambi;
2. Pimpinan dapat melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi yang mampu menjamin arah pembangunan secara berkesinambungan.

II.3. Realisasi Anggaran

II.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

II.3.1.1. Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp. 89.970.577.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.16 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

Sumber Dana	Pagu (Rp)	%
RM	87.170.577.000	97,98%
PNBP	1.800.000.000	2,02%
SBSN	-	-
Total	88.970.577.000	100%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu anggaran pada DIPA BPTD Kelas II Jambi TA.2024 s.d Triwulan IV sebesar **Rp. 109.361.095.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.17 Rincian per Sumber Dana Pagu per Triwulan IV Tahun 2024

Sumber Dana	Pagu (Rp)	%
RM	107.561.095.000	98,35%
PNBP	1.800.000.000	1,65%
SBSN	-	-
Total	109.361.095.000	100%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp. 89.970.577.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.18 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
Belanja Pegawai	17.633.587.000	19,82%
Belanja Barang	52.881.081.000	59,44%
Belanja Modal	18.455.909.000	20,74%
Total	88.970.577.000	100%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu anggaran pada DIPA BPTD Kelas II Jambi TA.2024 s.d Triwulan IV sebesar **Rp. 109.361.095.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.19 Rincian per Jenis Belanja Pagu per Triwulan IV Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
Belanja Pegawai	20.686.787.000	18,92%
Belanja Barang	63.738.399.000	58,28%
Belanja Modal	24.935.909.000	22,80%
Total	109.361.095.000	100%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Tahun 2024 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 24 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.

2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 31 Januari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
5. Revisi Ke-4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
6. Revisi Ke-5 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 18 April 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
7. Revisi Ke-6 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 7 Mei 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
8. Revisi Ke-7 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 88.970.577.000.
9. Revisi Ke-8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 21 Juni 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 89.125.808.000.
10. Revisi Ke-9 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 89.125.808.000.

11. Revisi Ke-10 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 9 Juli 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 89.125.808.000.
12. Revisi Ke-11 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 106.463.126.000.
13. Revisi Ke-12 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.
14. Revisi Ke-13 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 13 September 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.
15. Revisi Ke-14 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.
16. Revisi Ke-15 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 11 Oktober 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.
17. Revisi Ke-16 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 5 November 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.
18. Revisi Ke-17 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 18 November 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.
19. Revisi Ke-18 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 22 November dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.

20. Revisi Ke-20 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 29 November dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.

21. Revisi Ke-20 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2024 tanggal 27 Desember 2024 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 109.361.095.000.

II.3.1.2. Refocusing Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan dengan adanya Revisi DIPA BPTD Kelas II Jambi yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 20 (dua puluh) kali revisi DIPA. Berikut adalah rincian histori revisi per Sumber Dana, per Jenis Belanja.

a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2024

Tabel II.20 Rincian Revisi per Sumber Dana Tahun 2024

Pagu	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-1	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-2	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-3	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-4	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-5	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-6	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-7	87.170.577.000	1.800.000.000	-	88.970.577.000
Revisi Ke-8	87.325.808.000	1.800.000.000	-	89.125.808.000
Revisi Ke-9	87.325.808.000	1.800.000.000	-	89.125.808.000
Revisi Ke-10	87.325.808.000	1.800.000.000	-	89.125.808.000
Revisi Ke-11	104.663.126.000	1.800.000.000	-	106.463.126.000
Revisi Ke-12	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000
Revisi Ke-13	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000
Revisi Ke-14	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000
Revisi Ke-15	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000
Revisi Ke-16	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000
Revisi Ke-17	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000
Revisi Ke-18	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000
Revisi Ke-19	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000

Pagu	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Revisi Ke-20 [Revisi Pemutakhiran KPA]	107.561.095.000	1.800.000.000	-	109.361.095.000

Sumber Data: Aplikasi Satu DJA

a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2024**Tabel II.21** Rincian Revisi per Jenis Belanja Tahun 2024

Pagu	Jenis Belanja			Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu Awal	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-1	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-2	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-3	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-4	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-5	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-6	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-7	17.633.587.000	52.881.081.000	18.455.909.000	88.970.577.000
Revisi Ke-8	17.788.818.000	52.881.081.000	18.455.909.000	89.125.808.000
Revisi Ke-9	17.788.818.000	52.881.081.000	18.455.909.000	89.125.808.000
Revisi Ke-10	17.788.818.000	52.881.081.000	18.455.909.000	89.125.808.000
Revisi Ke-11	17.788.818.000	64.260.399.000	24.413.909.000	106.463.126.000
Revisi Ke-12	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000
Revisi Ke-13	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000
Revisi Ke-14	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000
Revisi Ke-15	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000
Revisi Ke-16	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000
Revisi Ke-17	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000
Revisi Ke-18	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000
Revisi Ke-19	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000
Revisi Ke-20 [Revisi Pemutakhiran KPA]	20.686.787.000	63.738.399.000	24.935.909.000	109.361.095.000

Sumber Data: Aplikasi Satu DJA

a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024 per Triwulan III**Tabel II.22** Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2024

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu awal	Perubahan	Pagu Per Triwulan I	Perubahan	Pagu Per Triwulan II	Perubahan	Pagu Per Triwulan III	Perubahan	Pagu Per Triwulan IV
Belanja Pegawai	17.633.587.000	-	17.633.587.000	155.231.000	17.788.818.000	2.897.969.000	20.686.787.000	-	20.686.787.000
RM	17.633.587.000	-	17.633.587.000	155.231.000	17.788.818.000	2.897.969.000	20.686.787.000	-	20.686.787.000
PNBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang	52.881.081.000	-	52.881.081.000	-	52.881.081.000	10.857.318.000	63.738.399.000	-	63.738.399.000
RM	52.581.081.000	-	52.581.081.000	-	52.581.081.000	10.857.318.000	63.438.399.000	-	63.438.399.000
PNBP	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	18.455.909.000	-	18.455.909.000	-	18.455.909.000	6.480.000.000	24.935.909.000	-	24.935.909.000
RM	16.955.909.000	-	16.955.909.000	-	16.955.909.000	6.480.000.000	23.435.909.000	-	23.435.909.000
PNBP	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	88.970.577.000	-	88.970.577.000	155.231.000	89.125.808.000	20.235.287.000	109.361.095.000	-	109.361.095.000

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2024**Tabel II.23** Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN IV
403845	BPTD Kelas II Jambi	88.970.577.000	-	88.970.577.000	155.231.000	89.125.808.000	20.235.287.000	109.361.095.000	-	109.361.095.000
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	64.852.167.000	-	64.852.167.000	-	64.852.167.000	17.337.318.000	82.189.485.000	-	82.189.485.000
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	17.500.000.000	-	17.500.000.000	-	17.500.000.000	- 662.682.000	16.837.318.000	-	16.837.318.000
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.582.899.000	-	9.582.899.000	-	9.582.899.000	-	9.582.899.000	-	9.582.899.000
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	33.625.548.000	-	33.625.548.000	-	33.625.548.000	18.00.000.000	51.625.548.000	-	51.625.548.000
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	-	4.143.720.000	-	4.143.720.000	-	4.143.720.000	-	4.143.720.000
WA	Program Dukungan Manajemen	24.118.410.000	-	24.118.410.000	155.231.000	24.273.641.000	2.897.969.000	27.171.610.000	-	27.171.610.000
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	262.000.000	-	262.000.000	-	262.000.000	-	262.000.000	-	262.000.000
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.222.823.000	-	6.222.823.000	-	6.222.823.000	-	6.222.823.000	-	6.222.823.000
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	-	17.633.587.000	155.231.000	17.788.818.000	2.897.969.000	20.686.787.000	-	20.686.787.000

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.1.3. Refocusing Anggaran Tahun 2024

Berikut adalah rincian perbandingan pagu dan realisasi Tahun anggaran 2020-2024:

Tabel II.24 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Triwulan II (Rp)	Pagu Triwulan III (Rp)	Pagu Triwulan IV (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	88.949.535.000	89.049.535.000	99.150.386.000	99.150.386.000	97.656.432.484	98,49%
2	2021	129.371.473.000	96.730.007.000	99.765.868.000	99.765.868.000	97.287.819.468	97,52%
3	2022	65.786.704.000	61.406.971.000	67.113.382.000	67.113.382.000	66.305.986.469	98,80%
4	2023	101.360.757.000	101.710.065.000	101.801.947.000	101.801.947.000	101.570.955.734	99,77%
5	2024	88.970.577.000	89.125.808.000	109.361.095.000	109.361.095.000	102.360.127.583	93,60%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2. Realisasi Anggaran Anggaran Tahun 2024**II.3.2.1. Realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024**

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024:

Tabel II.25 Rincian realisasi Anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI PAGU PER TRIWULAN II	%	PAGU PER TRIWULAN III	REALISASI PAGU PER TRIWULAN III	%	PAGU PER TRIWULAN IV	REALISASI PAGU PER TRIWULAN IV	%
403845	BPTD Kelas II Jambi	88.970.577.000	88.970.577.000	13.079.056.704	14,70 %	89.125.808.000	38.087.610.153	42,73 %	109.361.095.000	63.640.799.964	58,19 %	109.361.095.000	102.360.127.583	93,60 %
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	64.852.167.000	64.852.167.000	5.666.885.551	8,74	64.852.167.000	23.402.443.655	36,09	82.189.485.000	42.916.544.512	52,22	82.189.485.000	75.497.337.733	91,86
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	17.500.000.000	17.500.000.000	1.200.934.500	6,86	17.500.000.000	5.657.347.915	32,33	16.837.318.000	10.562.796.560	62,73	16.837.318.000	16.768.093.449	99,59
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.582.899.000	9.582.899.000	1.597.474.239	16,67	9.582.899.000	3.490.916.986	36,43	9.582.899.000	6.081.709.848	63,46	9.582.899.000	9.395.041.520	98,04
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	33.625.548.000	33.625.548.000	2.602.945.834	7,74	33.625.548.000	12.514.029.839	37,22	51.625.548.000	23.495.962.441	45,51	51.625.548.000	45.207.700.313	87,57
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	4.143.720.000	265.530.978	6,41	4.143.720.000	1.740.148.915	41,99	4.143.720.000	2.776.075.663	66,99	4.143.720.000	4.126.502.451	99,58
WA	Program Dukungan Manajemen	24.118.410.000	24.118.410.000	7.412.171.153	30,73	24.273.641.000	14.685.166.498	60,50	27.171.610.000	20.724.255.452	76,27	27.171.610.000	26.862.789.850	98,86

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI PAGU PER TRIWULAN II	%	PAGU PER TRIWULAN III	REALISASI PAGU PER TRIWULAN III	%	PAGU PER TRIWULAN IV	REALISASI PAGU PER TRIWULAN IV	%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	262.000.000	262.000.000	-	-	262.000.000	-	-	262.000.000	207.624.865	79,25	262.000.000	255.924.865	97,68
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	6.222.823.000	6.222.823.000	1.685.997.012	27,09	6.222.823.000	3.136.022.840	50,40	6.222.823.000	4.595.299.855	73,85	6.222.823.000	6.196.264.861	99,57
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	17.633.587.000	5.726.174.141	32,47	17.788.818.000	11.549.143.658	64,92	20.686.787.000	15.921.330.732	76,96	20.686.787.000	20.410.600.124	98,66

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2.2. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024:

Tabel II.26 Rincian realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Alokasi (Tw I)	Realisasi Pagu TW I		Pagu Alokasi (Tw II)	Realisasi Pagu TW II		Pagu Alokasi (Tw III)	Realisasi Pagu TW III		Pagu Alokasi (TW IV)	Realisasi Pagu TW IV	
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	20.686.787.000	20.686.787.000	5.726.174.141	27,68	20.686.787.000	11.549.143.658	55,83	20.686.787.000	15.921.330.732	76,96	20.686.787.000	20.410.600.124	98,66
2.	Belanja Barang	63.738.399.000	63.738.399.000	6.682.487.163	10,48	63.738.399.000	19.693.256.495	30,90	63.738.399.000	33.540.260.876	52,62	63.738.399.000	61.013.992.228	95,73
3.	Belanja Modal	24.935.909.000	24.935.909.000	670.395.400	2,69	24.935.909.000	6.845.210.000	27,45	24.935.909.000	14.179.208.356	56,86	24.935.909.000	20.935.535.231	83,96
Total		109.361.095.000	109.361.095.000	13.079.056.704	11,96	109.361.095.000	38.087.610.153	34,83	109.361.095.000	63.640.799.964	58,19	109.361.095.000	102.360.127.583	93,60

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2.3. Realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024

Berikut adalah rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024:

Tabel II.27 Rincian realisasi Anggaran per Sumber Dana Tahun 2024

No.	Sumber Dana	Pagu Awal	Pagu Alokasi (Tw I)	Realisasi Pagu TW I		Pagu Alokasi (Tw II)	Realisasi Pagu TW II		Pagu Alokasi (Tw III)	Realisasi Pagu TW III		Pagu Alokasi (TW IV)	Realisasi Pagu TW IV	
		Rp.	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1.	RM	107.561.095.000	107.561.095.000	13.079.056.704	12,16	107.561.095.000	37.607.054.058	34,96	107.561.095.000	61.846.019.323	57,50	107.561.095.000	100.565.346.942	93,50
2.	PNBP	1.800.000.000	1.800.000.000	-	-	1.800.000.000	480.556.095	26,70	1.800.000.000	1.794.780.641	99,71	1.800.000.000	1.794.780.641	99,71
3.	SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Total		109.361.095.000	109.361.095.000	13.079.056.704	11,96	109.361.095.000	38.087.610.153	34,83	109.361.095.000	63.640.799.964	58,19	109.361.095.000	102.360.127.583	93,60

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh Unit Kerja pada Tahun Anggaran 2024, detail sebagai berikut:

Tabel II.28 Anggaran Kegiatan yang terkena *Automatic Adjustment*

Automatic Adjustment	Rp.
Total Pagu Anggaran	109.361.095.000
Total Nilai Terkena AA	6.405.638.000
Akun 52 Belanja Barang	2.484.666.000
Akun 53 Belanja Modal	3.920.972.000
Detail Kegiatan Terkena AA, sebagai berikut:	
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	3.318.601.000
Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	203.289.000
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	2.750.000.000
Belanja Perjalanan Dinas	133.748.000

Sumber Data: Aplikasi Satu DJA

Tabel II.29 Sisa Anggaran per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu per Triwulan IV	Realisasi Pagu per Triwulan IV	Sisa Pagu	%
		Rp.	Rp.	Rp.	
1.	Belanja Pegawai	20.686.787.000	20.410.600.124	276.186.876	1,34%
2.	Belanja Barang	63.738.399.000	61.013.992.228	2.724.406.772	4,27%
3.	Belanja Modal	24.935.909.000	20.935.535.231	4.000.373.769	16,04%
Total		109.361.095.000	102.360.127.583	7.000.967.417	6,40%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

Tabel II.30 Sisa Anggaran per Sumber Dana Tahun Anggaran 2024

No.	Sumber Dana	Pagu per Triwulan IV	Realisasi Pagu per Triwulan IV	Sisa Pagu	%
		Rp.	Rp.	Rp.	
1.	RM	107.561.095.000	100.565.346.942	6.995.748.058	6,50%
2.	PNBP	1.800.000.000	1.794.780.641	5.219.359	0,29%
3.	SBSN	-	-	-	
Total		109.361.095.000	102.360.127.583	7.000.967.417	6,40%

Sumber Data: Aplikasi OM SPAN

II.3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut tabel Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dan Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya manusia:

II.3.3.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Tahun Anggaran 2024

Tabel II.31 Tabel efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi	% Capaian Rata-rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	75%	21%	54,00%	83%	39,08%	44,25%	90%	62%	28,50%	100%	91%	9,32%
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	49%	2%	47,00%	49%	37,62%	10,94%	49%	61%	-12,89%	102%	95%	6,50%
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	38%	11%	27,00%	48%	37%	10,54%	106%	56%	49,37%	115%	98%	17,12%
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	24%	6%	18,00%	58%	41,99%	15,79%	76,7%	67%	9,67%	100%	86%	13,81%
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	33%	37%	-4,00%	92%	60,5%	31,72%	94%	82%	12,07%	100%	98%	2,26%
Total		44%	15,40%	28,40%	66%	43,24%	22,65%	83,0%	65,61%	17,34%	103,3%	93,54%	9,80%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 103,3% dengan capaian keuangan sebesar 93,54 menunjukkan angka efisiensi sebesar 9,80%.

II.3.3.2. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya manusia**Tabel II.32** Rincian penggunaan sumber daya manusia Tahun 2024

No.	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	Capaian SDM	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	640	319	49,84%	100%	103%	103%

Sumber: Pengelola Kepegawaian

Berdasarkan tabel data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata target kinerja sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar 103% menunjukkan capaian SDM sebesar 49,84% dengan realisasi sebanyak 319 SDM dari jumlah kebutuhan SDM sebesar 640 SDM , dimana realisasi tersebut terdiri atas 169 Orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 148 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

II.3.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan dan kendala masih rendahnya daya serap anggaran antara lain:

- Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
- Masih adanya beberapa kegiatan yang anggaran nya terkena *Automatic Adjustment*;
- Terdapat salah satu indikator kinerja yang tidak mencapai target dikarenakan dalam penetapan target belum sesuai dengan dasar cara perhitungan manual IKK.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS II JAMBI

BAB III PENUTUP

BAB III**PENUTUP****III.1. Ringkasan Capaian**

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2024 ini terdapat 12 (Dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100% (target 100%);
 - 2) Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 3) Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 4) Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 98,61% (target 95%);
 - 5) Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 100% (target 100%);
 - 6) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 100% (target 100%);
 - 7) Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 30% (target 67%);
 - 8) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 2.269 orang (target 1.500orang);
 - 9) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 54% (target 80%);
 - 10) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP terealisasi 1 Lokasi (target 1 lokasi);
 - 11) Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai Nilai 90 (target Nilai 90);

- 12) Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai Nilai 90 (target Nilai 90).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
 3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *Zero Accident*.

III.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III.1 Tabel Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK 2024	Triwulan IV			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
1.	SK 1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100%	Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK 2024	Triwulan IV			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
									pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	
2.	SK 2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	95	98,61	103,8%	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	100	100%	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
3.	SK 4. Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	100	100	100%	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	67	67	30	155,22%	Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1500	2.269	151,27%	Tercapai	Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan telah dilaksanakan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK 2024	Triwulan IV			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	54	68	Tidak Tercapai	Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB;	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	1	100%	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
4.	SK 5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	90	100%	Tercapai	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan	Subbag Tata Usaha
5.	SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	90	100%	Tercapai	Melaksanakan layanan perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Internal	Subbag Tata Usaha



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BPTD KELAS II JAMBI

LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI

JAMBI, 3 JANUARI 2024

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II JAMBI

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat			
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Jambi, 3 Januari 2024

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 3 Januari 2024

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 3 Januari 2024
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO
NIP. 19790220 200112 1 001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	5.000.000.000	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8.233.829.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.349.070.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	1.354.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	1.354.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	2.032.881.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
						2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)												3.090.809.000	
						3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)												22.361.814.000	
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1. Operasional UPPKB -UPPKB Jambi Merlung -UPPKB Muara Tembesi -UPPKB Sarolangun -UPPKB Sungai Penuh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6.363.734.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	- Kota Jambi; - Kab. Batanghari - Kab. Merangin - Kab. Bungo - Kab. Tanjab Barat	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	2.750.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	350.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri 2. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	235.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi 2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.800.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	4.143.720.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	24.118.410.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, 5 Januari 2024
Kepala Balai

Eko Indra Yanto
NIP. 19790220 200112 1 001



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.I.K

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433

Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

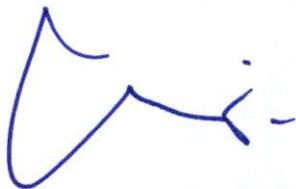
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	67
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 17.500.000.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.625.548.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.788.818.000

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

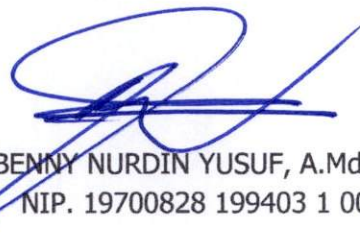


Irjen Pol. RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K
NRP. 66110433

Jambi, 1 Juli 2024

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

**REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/Penangggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	5.000.000.000	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A: - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8.233.829.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.349.070.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	95	8.233.829.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	1.354.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	1.972.312.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
					2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)													3.057.250.000	
					3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)													17.332.252.000	
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1. Kegiatan penindakan kendaraan angkutan barang pada UPPKB sebanyak 3 UPPKB: 1. UPPKB Jambi merlung; 2. UPPKB Tembesi; 3. UPPKB Sarolangun.	5.583	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	67	6.363.734.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	10	- Kota Jambi: - Kab. Batanghari - Kab. Merangin - Kab. Bungo - Kab. Tanjab Barat	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2.750.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	350.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pelaksanaan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	235.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					2. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri														
					3. Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor														
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1.800.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
					2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau														
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek perencanaan; b) Aspek kepegawaian (SDM); c) Aspek keuangan; d) Aspek penyelenggaraan perkantoran (umum).	5	10	15	20	30	40	45	50	60	70	80	90	4.143.720.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Kegiatan penyelenggaraan perkantoran	5	10	15	20	30	40	45	50	60	70	80	90	24.273.641.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, 1 Juli 2024
Kepala Balai


Dr. Drs. BENNY NORDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007



Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2024

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Pande Gede Semarapura, S.Kom., M.Si.	Penyusun Rencana dan Pelaporan	18/11/2024	
		Dina Safitri, S.H.	Pengadministrasi Perkantoran	18/11/2024	
2.	Disetujui	Alexander T.P. Pardede	Kepala Subbagian Tata Usaha	18/11/2024	
		Herry Wanda	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	20/11/2024	
		Ikra Surantha, S.T., M.T.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	19/11/2024	
		Riskan, A.Md LLAJ, S.E., M.M.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	20/11/2024	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Drs. Benny Nurdin Yusuf, A.Md. LLAJ., M.H.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 2 Desember 2024

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	67
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 16.837.318.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.582.899.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 51.625.548.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 262.000.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.222.823.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 20.686.787.000

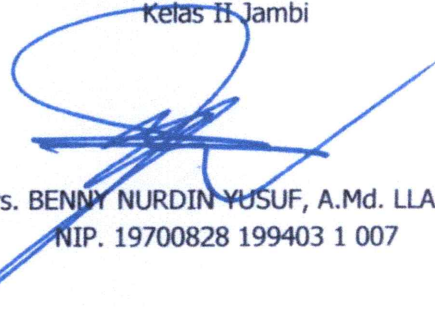
Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

AHMAD YANI, A.T.D., M.T.
NIP. 19650930 199003 1 003

Jambi, 2 Desember 2024

Pihak Pertama

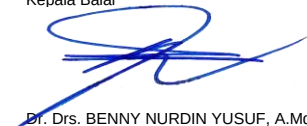
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II JambiDr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

**REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	4.803.741.000	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A: - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Pulau Tujuh Bangko Merangin - Terminal Muara Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8.233.829.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.349.070.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	95	8.233.829.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	903.946.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	90	100	1.972.312.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
					2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)													3.057.250.000	
					3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)													35.332.252.000	
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1. Kegiatan penindakan kendaraan angkutan barang pada UPPKB sebanyak 3 UPPKB: 1. UPPKB Jambi merlung; 2. UPPKB Tembesi; 3. UPPKB Sarolangun.	5,6	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	67	6.363.734.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-	350.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana/Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pelaksanaan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	0	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	80	185.074.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1.800.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
					2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau														
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek perencanaan; b) Aspek kepegawaian (SDM); c) Aspek keuangan; d) Aspek penyelenggaraan perkantoran (umum).	5	10	15	20	30	40	45	50	60	70	80	90	4.143.720.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Kegiatan penyelenggaraan perkantoran	5	10	15	20	30	40	45	50	60	70	80	90	27.171.610.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, 2 Desember 2024
Kepala Balai



Dr. Drs. BENNY NURDIN YUSUF, A.Md. LLAJ., M.H.
NIP. 19700828 199403 1 007

MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

BULAN DESEMBER TAHUN 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-12				Realisasi Bulan-12		Capaian Bulan-12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab		
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran					
								Volume	%	Volume	%								Volume	Volume
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	Jumlah Lintas Angkutan Jalan Perintis	Layanan Angkutan Jalan Perintis	100	100	4.803.741.000	100	100	4.799.838.000	100%	99,92%	Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	Jumlah Terminal Penumpang Tipe-A dikelola	Pelayanan Transportasi Darat	4	100	8.233.829.000	100	4	7.719.657.751	100%	93,76%	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	Jumlah Pelabuhan SDP	Pengawasan Operasional Pelabuhan SDP	4	100	1.215.322.000	100	4	952.468.435	100%	78,37%	Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	95	100	1.203.000.000	100	98,61	1.199.018.800	103,8%	99,67%	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	100	100	753.711.000	100	100	686.801.256	100%	91,12%	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	100	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	Melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Terlaksananya kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	100	100	1.769.023.000	100	100	1.768.880.000	100%	99,99%	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang; 4. Pada Kegiatan perlengkapan jalan terdapat penambahan anggaran dan target semula target jumlah kebutuhan perlengkapan jalan yang semula 77.844 m1/unit/lokasi menjadi 247.586 m1/unit/lokasi.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	
						2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)					3.057.250.000			3.057.250.000						100%
						3. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)					32.013.651.000			31.926.785.750						99,73%
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	67	Kegiatan penindakan kendaraan angkutan barang pada UPPKB sebanyak 3 UPPKB: 1. UPPKB Jambi merlung; 2. UPPKB Tembesi; 3. UPPKB Sarolangun.	Jumlah kendaraan barang yang ditimbang / diperiksa	Menurunnya jumlah kendaraan barang yang melanggar	67	100	6.363.734.000	100	30	5.671.381.256	156,70%	89,12%	Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	
IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Melaksanakan Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Terlaksananya Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	1.500	100	350.000.000	100	2269	349.953.007	151,27%	99,99%	Tercapai	Kegiatan tersebut telah terlaksana dengan jumlah masyarakat yang tersosialisasi berjumlah 2.269 Orang	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan			

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan-12				Realisasi Bulan-12		Capaian Bulan-12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Pelaksana / Penanggung Jawab
								Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
								Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	Volume	Volume			
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Kegiatan Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Melaksanakan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Perdirjen Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020.	Terlaksananya akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	80	100	185.074.000	100	54	184.712.000	67,5%	99,80%	Belum Tercapai	Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (100 Unit) termasuk supervisi	Melaksanakan pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	Terlaksananya pengadaan dan Pemeliharaan Rambu Sungai	1	100	1.800.000.000	100	1	1.794.780.641	100%	99,71%	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
					2. Pemeliharaan Rambu Sungai dan Danau													
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	1. Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat	Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat terdiri dari: a) Aspek perencanaan; b) Aspek kepegawaian (SDM); c) Aspek keuangan; d) Aspek penyelenggaraan perkantoran (umum).	Terlaksananya kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	90	100	4.143.720.000	100	90	3.571.415.231	100%	86,19%	Tercapai	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan teknis transportasi darat	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	1. Program Dukungan Manajemen	Kegiatan meningkatkan kualitas penyelenggaraan perkantoran	Terlaksananya kualitas penyelenggaraan perkantoran yang baik	90	100	27.171.610.000	100	90	26.556.659.260	100%	97,74%	Tercapai	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perkantoran yang baik	Subbag Tata Usaha